

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Masalah yang umum dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah mengejar ketertinggalannya dalam hal pembangunan ekonomi dan teknologi dari negara maju. Sementara perkembangan antar daerah pedesaan dan daerah industri di perkotaan juga menjadi permasalahan setelah adanya otonomi daerah ini. Sektor industri besar masih banyak terdapat di daerah perkotaan sedangkan di daerah pedesaan umumnya industri kecil. Selain itu Indonesia juga dihadapi oleh permasalahan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2002 menunjukkan sebesar 212.003 juta jiwa sedangkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 sebesar 1,49 %, (Statistik Indonesia, BPS, 2002).

Bangsa Indonesia pada umumnya berorientasi pada pemecahan permasalahan di atas. Pemecahan tersebut tidak dapat dilakukan secara sebagian saja, tetapi harus bersifat nasional dalam rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung secara terus menerus untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan nasional tersebut antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Konsep pembangunan, sering dikaitkan dengan proses industrialisasi karena keduanya dianggap mempunyai pengertian yang sama. Industrialisasi pada hakekatnya adalah pembangunan sistem yang mempunyai dinamika dan kemampuan berkembang secara mandiri serta mengakar pada struktur ekonomi dan struktur masyarakat. Hal ini mempunyai arti bahwa dalam pembangunan ekonomi menekankan pada semua sektor, baik sektor pertanian, sektor jasa, sektor industri maupun lainnya.

Pembangunan industri di Indonesia diupayakan untuk mengembangkan potensi yang ada, dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Industri yang dikembangkan meliputi keseluruhan industri, baik industri besar, industri sedang maupun industri kecil. Dimana industri kecil tetap dikembangkan, karena industri kecil mempunyai peranan yang penting bagi perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Penegasan tentang usaha pembangunan industri di nyatakan sebagai berikut : (GBHN, 1999).

Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan kompetitif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.

Industri mempunyai peranan sebagai "sektor pemimpin" (*leading sektor*), maksudnya adalah dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya misalnya seperti sektor pertanian

dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi sektor industri. Sektor jasa juga akan berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga pemasaran dan periklanan, dan sebagainya yang semuanya itu akan mendukung laju pertumbuhan industri. Jika keadaan tersebut dapat diwujudkan maka akan meluasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Apabila kenaikan dan peningkatan daya beli (permintaan) tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan itu tumbuh dan sehat, (Lincoln Arsyad, 1992).

Peranan sektor industri dalam perkembangan struktural pada perekonomian Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan serangkaian tolak ukur yang menyangkut, bagian dari sumbangan sektor industri (*manufacturing*) terhadap produk nasional, bagian dari angkatan kerja yang mendapat nafkah dari mata pencariannya di sektor industri (peran sektor industri pada penciptaan lapangan kerja), serta susunan komposisi ekspor barang dan jasa dalam lalu lintas pembangunan nasional, (Sumitro Djohadikusumo, 1987).

Tahap awal pembangunan sektor industri Indonesia di dukung oleh adanya kebijakan pemerintah orde baru dalam hal penanaman modal. Dengan dikeluarkannya undang-undang baru dalam bidang penanaman modal, yakni undang-undang No. 1/1967 jo, No 11/1970 tentang PMA dan undang-undang No. 6/1968 jo, No. 12/1970 tentang PMDN. Dimana undang-undang tersebut mampu membangkitkan gairah dan perkembangan sektor industri, (Dumairy, 1997), dimana selama pemerintahan orde

lama mengalami kelesuan karena situasi politik yang tidak menentu dan mengalami pergolakan disamping itu juga kelangkaan modal serta tenaga ahli. Setelah undang-undang tersebut diterbitkan maka penanaman modal banyak yang masuk ke Indonesia sehingga mendorong industri-industri baru bermunculan, terutama industri substitusi impor.

Sebenarnya pentingnya peran industri kecil dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang telah lama di sadari dan diakui oleh para ahli ekonomi pembangunan. Industri kecil selalu berguna bagi output tertentu, efek kesempatan kerja yang diciptakan oleh industri kecil akan besar dari pada efek serupa yang dihasilkan oleh industri besar, selain itu dari sifat sebenarnya dan keterkaitannya sangat potensial untuk mendorong ekonomi pedesaan.

Pada kenyataannya sektor industri mengalami peningkatan sebelum krisis pada tahun 1997. Dimana pada awal-awal krisis banyak perusahaan besar yang tidak mampu bertahan sehingga banyak yang mengalami gulung tikar. Hal tersebut sangat berbeda dengan industri kecil dan menengah yang mampu bertahan walau terjadi krisis ekonomi tersebut.

Pengembangan industri kecil berorientasi terutama pada program pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan, yang mencakup produk-produk kerajinan daerah yang memperlihatkan peningkatan pemasaran di dalam negeri dan luar negeri yang erat kaitannya dengan perkembangan pariwisata, (Edy Suandi Hamid, 1997), hal ini dapat tercapai apabila perkembangan industri kecil dapat merata sampai ke daerah-daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka, peran

pemerintah daerah sangat besar guna mengembangkan dan membina melalui instansi terkait.

Pola pembinaan dan pengembangan industri daerah dilakukan dengan memperhatikan potensi daerah masing-masing, serta senantiasa membangun keterkaitan antar sektor industri maupun antar industri kecil dengan industri besar atau sedang guna mempersempit kesenjangan yang terjadi. Pembinaan dan pengembangan tersebut dilakukan melalui pengembangan industri potensi lokal, industri mandiri serta jalur sentra industri.

Setelah adanya pembinaan dan pengembangan dari industri kecil tersebut diharapkan potensi industri kecil dan kerajinan rumah tangga diharapkan meningkat. Di lihat dari segi potensi maka Kabupaten Ngawi sangat cocok bagi pengembangan industri kecil karena sebagian masyarakatnya berada pada wilayah pedesaan yang sangat cocok bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.

Potensi industri di Kabupaten Ngawi sebagian besar adalah industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga. Dari total industri sebanyak 13.737 unit usaha sampai tahun 2002, berarti mengalami rata-rata kenaikan tiap tahun sebesar 2,90% dari tahun 1994 dari total industri sebanyak 12.188 unit usaha.

Tabel 1.1.
Perkembangan Industri Kecil di Kabupaten Ngawi
Tahun 1994 - 2002.

Uraian	Tahun										Rata - rata kenaikan (%)
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002		
Unit Usaha	12.188	12.318	12.529	12.560	12.929	12.929	12.687	13.498	13.737	2,90	
Tenaga Kerja	32.841	32.943	33.512	34.635	35.218	33.447	33.731	34.995	35.891	2,39	
Nilai Investasi	1.992.518	2.481.330	3.504.867	3.778.425	3.790.592	3.328.827	19.584.629	19.899.420	19.959.220	13,28	
Nilai Bahan Baku	31.012.688	31.742.771	32.324.614	32.816.867	33.799.065	34.738.796	35.813.193	38.866.389	41.496.439	3,73	
Nilai Produksi	24.498.164	28.839.164	30.186.191	30.579.250	30.609.436	58.745.444	59.914.135	64.224.084	68.202.845	3,01	
Nilai Tambah	22.821.539	23.050.335	23.302.904	23.888.044	24.183.338	24.006.648	24.100.942	25.357.695	26.706.406	3,25	

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, berbagai tahun.

Melihat dari data 1.1., dapat dilihat bahwa perkembangan tenaga kerja sangat kecil yaitu sebesar 2,39%. Namun apabila dilihat dari unit usaha persentasenya lebih baik dari tenaga kerja yaitu sebesar 2,90%, nilai investasi sebesar 13,28%, dan nilai produksi sebesar 3,01%. Perkembangan diatas menunjukkan bahwa industri kecil dalam jangka panjang dapat dijadikan sektor andalan Kabupaten Ngawi.

Tabel 1.2.
Sumbangan Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Ngawi Berdasar Harga Konstan Tahun 1993.

Tahun	PDRB (000)	Sektor Industri (000)	%
1994	604.135.300	36.113.400	5,98
1995	637.721.270	38.707.710	6,07
1996	681.733.430	42.948.970	6,30
1997	709.257.430	40.681.890	5,74
1998	665.282.820	39.939.900	6,00
1999	672.132.140	41.599.140	6,19
2000	682.512.220	42.126.500	6,17
2001	702.746.390	42.944.700	6,11
2002	710.952.630	43.741.190	6,15

Sumber: Kabupaten Ngawi Dalam Angka, BPS, berbagai tahun.

Sumbangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngawi pada tahun 2002 berdasar harga konstan tahun 1993 dari sektor pertanian 288.907.79 (40,63%), dari sektor perdagangan, hotel dan restoran 199.821.01 (28,11%), dari jasa-jasa 82.339.76 (11,58%), dan dari sektor industri 43.741.19 (6,15%), (BPS Ngawi, 2001).

Dengan melihat uraian diatas yang meliputi sumbangan sektor industri terhadap PDRB, kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja,

nilai output yang dihasilkan oleh sektor industri, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung perkembangan sektor industri, menyiratkan perlunya sektor industri kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Perkembangan sektor industri tersebut menunjukkan industri kecil dalam jangka panjang dapat dijadikan sebagai sektor andalan komoditi di Kabupaten Ngawi. Maka pembinaan terhadap industri kecil yang meliputi: permodalan, strategi pemasaran, kebijakan-kebijakan yang mendukung iklim usaha, serta pelatihan dan pendidikan manajemen usaha, perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Berdasar permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik guna meneliti industri kecil dengan judul: **“PERAN DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL DALAM PEREKONOMIAN KABUPATEN NGAWI PROPINSI JAWA TIMUR”**.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Dalam pemecahan masalah mengetahui sumber permasalahan merupakan langkah penting yang harus dilakukan, karena sebagai landasan dalam menyikapi permasalahan tersebut baik di masa yang akan datang serta mengantisipasi dan mengendalikannya.

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam pembahasan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan industri kecil di Kabupaten Ngawi.

2. Bagaimana peran industri kecil dalam perekonomian Kabupaten Ngawi, khususnya pada penerimaan PDRB.
3. Bagaimana perkembangan industri kecil di Kabupaten Ngawi.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berkenaan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diutarakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan industri kecil di Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui kemampuan industri kecil dalam menyerap angkatan kerja di Kabupaten Ngawi.
3. Untuk mengetahui perkembangan unit usaha, sentra usaha, nilai investasi, nilai produksi serta perkembangan nilai tambah sektor industri kecil di Kabupaten Ngawi.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Melatih bekerja dan berfikir kreatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama studi, serta memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi dalam

peningkatan usaha serta sebagai bahan dalam rangka pembinaan serta pengembangan industri kecil di Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur.

1.5. METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penelitian dan untuk membuktikan benar tidaknya maka dalam penulisan ini penulis akan menggunakan metode, yaitu:

1.5.1 Studi Pustaka

Studi pustaka diarahkan untuk mendapatkan landasan teori yang relevan dengan analisis yang akan di gunakan dalam penelitian. Dasar-dasar teoritis di peroleh dari surat kabar, literatur-literatur, majalah-majalah ilmiah, serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

1.5.2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah tercatat yang berasal dari kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi, Dinas Koperasi Kabupaten Ngawi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi, sedangkan data yang dibutuhkan:

1. Data PDRB di Kabupaten Ngawi.
2. Output keseluruhan setiap kelompok industri kecil.
3. Input keseluruhan setiap kelompok industri kecil.
4. Jumlah investasi yang dikeluarkan.
5. Jumlah tenaga kerja.
6. Nilai tambah setiap kelompok industri kecil.

Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara serta membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian.

1.5.3. Batasan Penelitian

Analisa data mengenai peran dan perkembangan industri kecil dalam perekonomian Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur dimulai pada tahun 1994 - 2002.

1. Peran industri kecil dalam perekonomian Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur adalah peran industri kecil dalam pembentukan PDRB, serta peranannya dalam menyerap angkatan kerja.
2. Perkembangan industri kecil dalam skripsi ini, yaitu perkembangan unit usaha, sentara usaha, nilai produksi, nilai investasi, serta perkembangan nilai tambah.
3. Klasifikasi usaha industri kecil berdasar klasifikasi kelompok industri yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
4. Obyek penelitian adalah jenis industri kecil di Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur.
5. Karena adanya keterbatasan data periode penelitian adalah tahun 1994 – 2002, dan tidak tertutup kemungkinan tinjauan secara retrospektif dan prospektif diluar periode tersebut, sejauh masih relevan dan representatif dengan masalah yang diteliti.

1.6. ALAT ANALISIS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Artinya metode analisa yang dilakukan tanpa melakukan penghitungan-penghitungan, melainkan dengan menggunakan pemikiran-pemikiran berdasar pada teori-teori yang mendukung sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, yang sifatnya subyektif. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa, (Masri Singaribun, 1989).

Menurut F.L. Whitney : "*metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat*" cara kerja untuk memenuhi kebenaran masalah yang diteliti adalah dengan "metode analisa" yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Eugene J. Mehan, mengartikan *analysis method* sebagai suatu rangkaian aksi atau pikiran yang menganalisis permasalahan secara mendalam, terutama mempelajari bagian satu sama lain hubungannya atau peran yang utuh, (Muhammad Amiruddin Nurfahevi, 1998).

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini disusun dalam tema, dan bab sebagai berikut:

BAB I. : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan yang diamati, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penelitian yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

BAB III : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan dan sesuai dengan apa yang akan digunakan.

BABVII : GAMBARAN KEADAAN WILAYAH KABUPATEN NGAWI, PROPINSI JAWA TIMUR.

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai kondisi dari berbagai aspek seperti letak dan luas monografi, keadaan ekonomi, penduduk, dan mata pencarian

BAB V : ANALISA DATA

Bab ini menguraikan dan merumuskan pembahasan hasil pengumpulan data.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis terhadap penelitian yang telah dikemukakan diatas.